

VI. KESIMPULAN DAN MODEL ALTERNATIF

Berdasarkan hasil kaji ulang peran koperasi dalam menunjang ketahanan pangan dengan fokus pada masalah distribusi pupuk dan pengadaan pangan/beras pada tujuh daerah survei masing-masing Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah, diambil kesimpulan sesuai tujuan penelitian sebagai berikut :

6.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Koperasi dalam Menunjang Ketahanan Pangan

Peran koperasi dalam menunjang ketahanan pangan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan menyediakan pupuk bagi petani dan kemampuan pengadaan pangan/beras. Sesuai hasil-hasil estimasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penyediaan pupuk koperasi adalah :

1. Jumlah penyaluran pupuk koperasi. Jumlah pupuk yang disalurkan koperasi relatif kecil yakni hanya sekitar 30 %. Jumlah ini sesuai dengan kebijakan pupuk yang sedang berlaku dimana koperasi hanya diberikan kesempatan kecil sementara swasta lebih dominan. Dengan demikian kemampuan koperasi dalam penyaluran pupuk sudah dibatasi oleh kebijakan pupuk yang ada sekarang.
2. Jumlah penyaluran pupuk swasta. Swasta sangat dominan dalam penyaluran pupuk sehingga jumlah yang disalurkan juga besar. Sesuai fakta lapangan, dominasi swasta makin menekan kesempatan koperasi untuk menyalurkan pupuk. Hal ini terkait dengan posisi tawar swasta yang lebih besar dan monopoli swasta di pasar pupuk.
3. Kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya pupuk diekspor ke luar negeri, dijual ke perusahaan perkebunan besar atau dihilangkan untuk tujuan tertentu. Kuota pupuk yang kecil bagi koperasi disertai kelangkaan pupuk menyulitkan koperasi menyediakan pupuk dalam jumlah yang memadai bagi petani.
4. Jumlah permintaan pupuk petani. Permintaan pupuk petani khususnya di Pulau Jawa terus meningkat. Penyebabnya adalah terjadi pergeseran musim tanam, adanya perluasan tanam gadu, dan perluasan areal tanaman pangan. Sementara koperasi mewadahi sejumlah besar petani yang sejak lama terbina

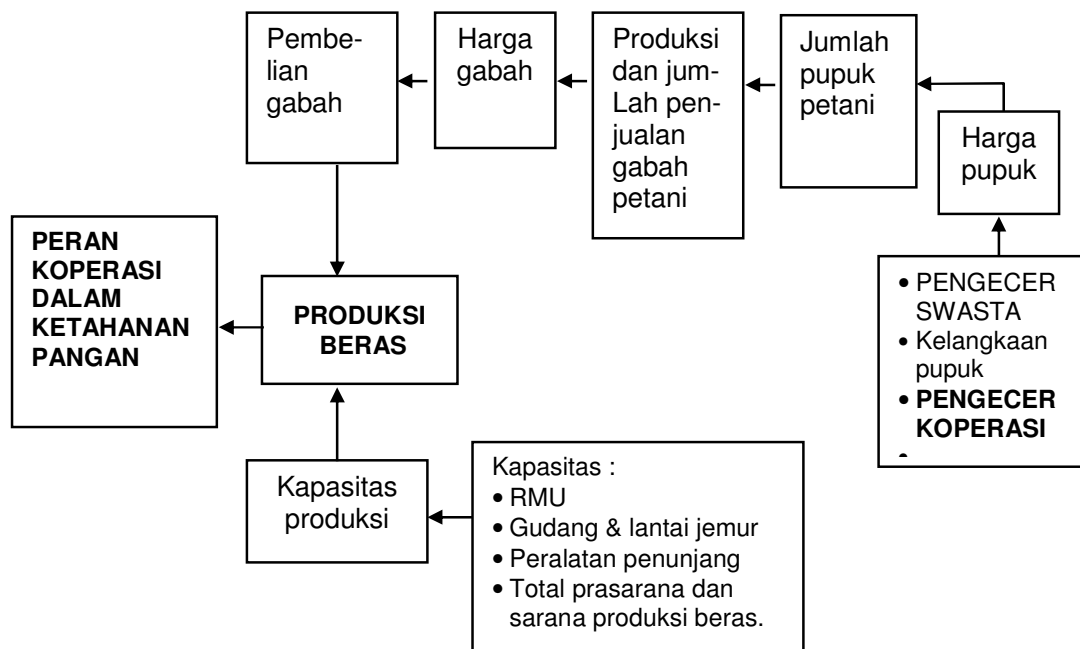
- dengan baik. Kecilnya kuota penyaluran pupuk oleh koperasi disertai terjadinya kelangkaan pupuk dan makin meningkatnya permintaan petani semakin melemahkan kemampuan koperasi menyediakan pupuk bagi petani.
5. Harga pupuk. Harga riil pupuk tingkat petani yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak dapat dikontrol oleh koperasi, melemahkan fungsi pelayanan "sosial" koperasi. Selain itu monopoli pasar pupuk dan penyaluran pupuk oleh swasta yang menyebabkan harga pupuk lebih tinggi kemungkinan memberikan kendala pembiayaan bagi koperasi untuk menyediakan pupuk bagi petani.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam pengadaan pangan/beras adalah :

1. Jumlah produksi dan penjualan gabah petani. Kemampuan koperasi dalam pengadaan pangan/beras bermula dari kemampuannya mendorong kenaikan produksi gabah petani yang kemudian meningkatkan jumlah penjualan mereka. Produksi gabah petani dapat meningkat bila dukungan koperasi dalam penyediaan pupuk juga berlangsung secara baik. Dukungan koperasi pada penyediaan pupuk relatif kecil maka dukungan tidak langsung pada produksi gabah dan penjualan petani juga relatif kecil. Selain itu dukungan koperasi dalam hal kelembagaan kepada petani banyak mengalami penurunan sehingga turut mempengaruhi produksi gabah petani. Koperasi belum berperan maksimal sebagai tempat bagi penjualan gabah petani.
2. Harga gabah. Harga gabah berfluktuasi sesuai musim panen dan berkompetisi antara pihak koperasi dan tengkulak. Harga gabah koperasi relatif stabil sedangkan harga tengkulak fluktuatif. Saat-saat panen raya dimana harga gabah menurun, harga gabah koperasi yang relatif stabil menguntungkan bagi para petani. Sementara saat-saat paceklik dimana harga gabah naik, tengkulak lebih menguntungkan bagi petani.
3. Pembelian gabah. Koperasi mengalami kendala pembelian gabah karena permodalan yang terbatas.
4. Produksi dan kapasitas produksi beras. Produksi dan kapasitas produksi beras koperasi relatif mengalami penurunan akibat kapasitas peralatan pendukung yang sudah beroperasi di bawah kapasitas normal.

5. Kapasitas prasarana dan sarana produksi beras. Kapasitas RMU, gudang dan lantai jemur, peralatan penunjang lainnya bahkan prasarana dan sarana secara keseluruhan telah mengalami penurunan karena tidak beroperasi secara normal. Faktor penyebabnya adalah berkurangnya kegiatan pengadaan pangan koperasi akibat berubahnya kebijakan pengadaan pangan.

Secara umum, bagan faktor-faktor yang mempengaruhi di atas dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Bagan Keterkaitan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Koperasi dalam Menunjang Ketahanan Pangan

6.2. Evaluasi Efektifitas Kebijakan Distribusi Pupuk dan Pengadaan Gabah/Beras

Berdasarkan hasil-hasil estimasi, analisis simulasi dan kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi di atas, beberapa kesimpulan tentang efektif tidaknya kebijakan distribusi pupuk dan pengadaan beras yang telah dijalankan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan distribusi pupuk saat ini telah memberikan dampak yang positif yakni efektif pada penyaluran pupuk level propinsi hingga ke kabupaten. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan distribusi pupuk dari level propinsi hingga ke kabupaten pada semua propinsi sampel relatif berlangsung normal. Namun pada level pengecer, muncul berbagai kegagalan antara lain pupuk langka di pasar ketika petani membutuhkannya dan harga riil pupuk di pasar secara umum berada di atas HET.
2. Hasil analisis faktor yang mempengaruhi menunjukkan terdapat kecenderungan para distributor dan pengecer pupuk terutama pengecer swasta menggunakan signal harga sebagai indikator dalam menyalurkan pupuk ke petani. Pada hal pupuk adalah komoditi publik yang disubsidi pemerintah guna meningkatkan produksi pangan petani dalam rangka pengamanan pangan nasional. Secara tegas perilaku seperti ini bertentangan dengan jiwa kebijakan distribusi pupuk pemerintah.
3. Hasil analisis faktor yang mempengaruhi juga menunjukkan unit-unit koperasi yang telah menjalankan usaha pengadaan pangan pada waktu lalu mengalami kemunduran signifikan. Unit-unit koperasi pada 4 dari 7 propinsi sampel penelitian mengalami penurunan kapasitas produksi atau mereka beroperasi di bawah kapasitas terpasang. Jika semula unit-unit koperasi yang telah menjalankan usaha-usaha pengadaan pangan/beras adalah bahagian dari total kapasitas terpasang produksi pangan nasional maka penurunan kapasitas koperasi karena perubahan kebijakan sekarang telah berdampak menurunkan kapasitas produksi pangan (gabah/beras) nasional.
4. Hasil-hasil simulasi dua skenario pada Tabel 3 dan 5 menunjukkan, dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pemerintah melepaskan distribusi pupuk dan pengadaan beras ke pasar adalah secara umum menekan penggunaan pupuk petani. Akibatnya produksi gabah dan pendapatan petani menurun,

- yang selanjutnya menurunkan produksi beras dan juga kapasitas produksi beras koperasi, dan menurunkan kinerja usaha-usaha koperasi.
5. Kebijakan distribusi pupuk dan pengadaan beras yang sedang dijalankan sekarang tidak efektif menciptakan kemampuan produksi pangan (beras) dalam negeri.

6.3. Kebijakan-kebijakan Alternatif Pendukung Distribusi Pupuk dan Pengadaan Gabah/Beras

Hasil simulasi skenario alternatif kelompok pertama pada Tabel 6 – 8 memberikan kesimpulan bahwa terdapat dua alternatif kebijakan yang diprioritaskan untuk diterapkan, masing-masing :

1. Kebijakan memerankan swasta dan koperasi secara seimbang dalam penyaluran pupuk disertai kenaikan penggunaan pupuk para petani sebesar 25 %, dikombinasikan dengan kebijakan memerankan kembali koperasi dalam pembelian gabah dan beras yakni peningkatan pembelian gabah koperasi 25 %.
2. Kebijakan memerankan koperasi secara penuh baik pada penyaluran pupuk maupun pada pengadaan pangan/beras.

Hasil simulasi alternatif kelompok kedua menghasilkan beberapa kebijakan alternatif tambahan antara lain :

1. Harga gabah dapat dinaikan sebesar 10 % dan harga pupuk sebesar 5 %.
2. Untuk menunjang pengadaan pangan/beras koperasi dan pengembangan sistem bank padi yang telah dijalankan koperasi, paket kebijakan yang mendukung adalah peningkatan penggunaan pupuk secara langsung pada petani (25 %), peningkatan harga gabah 10 %, peningkatan kredit atau modal kepada koperasi untuk pembelian gabah 10 %, peningkatan kapasitas prasarana dan sarana produksi beras koperasi 25 % serta peningkatan kenaikan aset dan volume usaha koperasi 10 %.

6.4. Model Alternatif Penyaluran Pupuk dan Pengadaan Gabah/Beras

Model alternatif penyaluran pupuk yang dapat diterapkan koperasi adalah seperti pada Gambar 6. Sedangkan model alternatif pengadaan pangan/beras adalah pada Gambar 7 dan 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Ketahanan Pangan. 2002. Kebijakan Umum Pemantapan Pangan Nasional. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2006. Ekspor Ilegal Pupuk Bersubsidi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Donald Ary, L. Ch. Yacobs and Razavich. 1979. Introduction in Research Education 2nd Edition. Hott Rinehart and Winston, Sydney.
- Earl R. Babie. Survey Research Methods. 1973. Belmont, Wadsworth Publication Co., California.
- Frank Ellis, 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press. Cambridge.
- Intriligator. M, Bodkin. R, Hsiao. C. 1996. Econometric Models, Techniques, and Applications. Second Edition. Prentice-Hall International, Inc. USA.
- Just.R.E, Hueth.D.L, and Schmit. A. 1982. Applied Welfare Economics and Public Policy. Prentice-Hall, Inc., USA.
- Kariyasa K. dan Yusdja Y. 2005. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Kementerian Koperasi dan UMK, 2005. Konsep Usulan Proposal Penyempurnaan Tataniaga Pupuk Bersubsidi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Jakarta.
- Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition. The MacMillan Press Ltd, London.
- Media Industri dan Perdagangan, 2006. Pupuk, Komoditas Strategis yang Harus Diamankan. Media Industri dan Perdagangan, Jakarta.